SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

*INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND GOOD GOVERNANCE OF LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE IN THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATION***Oleh:**

ADYTIA HUTAMA HERMAWAN
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
E-mail: aditya_hermawan17@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted at the Regional Work Units (SKPD) Bandung . The phenomenon that is still going on internal control system on local government performance There is still a problem in the there is still a problem in accordance with the principle of transparency that is not good governance and there is also the problem of poor internal control systems which have implications for the performance of local governments , objective of this study namely to determine the effect internal control system and good governance Against local government performance.

The method used in this research is descriptive and verification methods. The unit of analysis in this study is is SKPD Bandung totaling 32 Respondency . Sampling was done by using sampling techniques saturated . Statistical test using the test equation based strukturan variance or better known as Partial Least Square (PLS) using software SmartPLS 3.2.

The results of this study indicate that internat control system , good governance and local government performance together have a significant effect . The influence of internal control system and good governance clarity positive and significant impact on local government performance .

Keywords: Internal control system, Good Governance, and Local Government Performance
K*eywords: Organizational Citizenship Behavior, Job Satisfaction, Organizational Justice.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Tuntutan masyarakat yang semakin kritis mengakibatkan pemerintah daerah harus menunjukkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik dan sebagai bentuk dari pelaksanaan APBD. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan berkualitas (Yuliana Dwi Jayanti:2015)..

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi (Izmavita Sarah K:2015).

Pemerintah Daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampumenciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim: 2007).

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo:2006 dalam Dedi Kusmayadi:2009).).

Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Akan Panggil Eksekutf. Entang Suryaman mengkritik Kinerja Diskominfo Kota Bandung. Menurut Entang Suryaman, pelayanan informasi masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurang efektifnya pelaksanaan program program. Mengingat hal tersebut bisa menjadi tolak ukur masyarakat dalam memantau kinerja Pemkot Bandung mengenai hasil capaian kinerja yang telah dilakukan. (Entang Suryaman 2014)

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal. (Indah:2012).

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung, E.M Ricky Gustiadi, akan diberhentikan Rabu (13/1). “Surat Keputusan (SK) nya sudah ditandatangani,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Selasa (12/1). Pemberhentian ini, lanjut Ridwan, “Banyak agenda reformasi dan Kegiatan Pengendalian yang tidak tercapai, pengawasan atau pemantauan berjalan kurang baik yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja , sehingga dengan berat hati tidak bisa menduduki posisi tersebut,” papar Ridwan kamil(Ridwan Kamil : 2015)

Identifikasi Masalah

1. Sistem Pengendalian Intern yang belum dilaksanakn secara maksimal di Dinas Perhubungan.
2. Buruknya pelayanan inforamsi yang diberikan Diskominfo Kota Bandung tidak sesuai penerapan Good Governance.
3. Belum maksimalnya sistem pengendalian intern di Dinas Perhubungan yang dikahawirkan akan berpengaruh kepada kinerja.

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada DISHUB dan DISKOMINFO
2. Seberapa besar pengaruh Good Governance (tata kelola pemerintah yang baik) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada DISHUB dan DISKOMINFO

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
2. Untuk mengetahui seberapa besar Good Governance (tata kelola pemerintah yang baik) terhadap Kinerja. Pemerintah Daerah

Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat meningkatan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat penulis mengenai pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini juga berguna untuk sebagai bahan penulisan usulan penelitian yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Komputer (UNIKOM) Indonesia Bandung.

b. Bagi Perkembangan Ilmu

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan referensi ilmiah khususnya akuntansi sektor publik mengenai pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. dengan membuktikan teori serta hasil penelitian terdahulu.

Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori dan prakteknya dilapangan, belajar menganalisa dan menganalisis permasalahan yang ada khususnya dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi

b. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi atau referensi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan yang lebih lanjut.

Kajian Pustaka

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2010:163) Menyatakan

"Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen."

Good Governance

Menurut Wiranto (2012:1) dalam Auditya, Lucy dkk (2013) mengatakan: "Good governance dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara".

Kin Mahmudi (2005) dalam Astuti, Ratih Widya:2011 menyatakan bahwa:

Menurut Arsyiaty, dkk (2008) dalam Usman dan Lukman (2014) "Kinerja Pemerintah Daerah merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas."

Kerangka Pemikiran

Keterkaitan Sistem Pengendalian Intern dengan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2009:54) mengenai hubungan Sistem pengendalian intern dan kinerja menyatakan bahwa : "Tujuan sistem pengendalian intern adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi (Pemerintah), sistem pengendalian intern dilakukan untuk melindungi harta/aktiva organsisai dan pencatatan pembukuannya, sistem pengendalian intern digunakan untuk mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usahan dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan."

Menurut Murwanto (2012: 195) mengenai hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Menyatakan bahwa : "Sistem Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu kinerja" "

Keterkaitan *Good Governance* dengan Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Agus Dwiyanto (2009 : 34) mengenai hubungan Sistem pengendalian intern dan Kinerja menyatakn bahwa :

"Dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga"

Sedarmayanti, (2004:4) merumuskan :

"arti good governance sebagai kepemerintahan yang mengemban akan menerapkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektifitas, supremasi hukum, guna mendukung kinerja eksekutif dan dapat di terima oleh semua masyarakat.

Penelitian Hermanson (2007), mengenai hubungan antara penerapan Good government governancedengan kinerja organisasi menyatakan bahwa: "Penerapan Good governance berasosiasi dengan kinerja pemerintah . Suatu pemerintah akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam pemerintah tersebut menerapkan Good governance, apabila Good governance-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat output yang dihasilkan juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerapan Good governance merupakan suatu hal yang tepat dalam suatu pemerintah"

Hipotesis

H1: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H2: Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian.

"Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk `dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah". Sugiyono (2009:4)

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi". Sugiyono (2011:147)

Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2008:29) untuk memperoleh data dalam suatu penelitian, maka hendaknya dilakukan penjabaran sejumlah variabel lengkap dengan konsep, indikator, ukuran dan skalanya. Penjabaran dari variabel penelitian, beserta unsur-unsur terkait biasanya diaplikasikan dengan bentuk tabel, dengan maksud memperjelas konsistensi dan kebenaranya

Sumber Data

1. Data primer

"Ada dua cara pokok untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan obyek yang diteliti atau responden dan melakukan observasi. Komunikasi dengan responden dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner. Kuesioner dapat secara tertulis maupun lisan. Sedangkan observasi dilakukan dengan tanpa pertanyaan". Narimawati Umi (2007:47) dalam hal ini penulis mengguakan teknik kuesioner, teknik pengumpulan data dengan form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada obyek penelitian guna mendapat informasi.

2. Data sekunder

"Data sekunder merupakan data yang sudah ada; data tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak mendesak". Narimawati Umi (2007:51)

Teknik Penentuan Data

Populasi

Sugiyono (2013:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan pada PT. Wijaya Motor Lestari Bandung yang berjumlah 150 orang

Sampel

Menurut Sugiyono (2009:116), sampel adalah : "Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut." Teknik yang di ambil dalam penelitian dilakukan dengan teknik *Sratified random sampling*. Teknik pengambilan sampel *Sratified random sampling* adalah metode penarikan sampel dengan terlebih dahulu mengelompokan populasi kedalam strata-strata berdasarkan kriteria tertentu kemudian memilih secara acak sederhana setiap stratum (Vincent Gaspersz,2000:63).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (Library Reseach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Penelitian lapangan (Field Research)

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara (Interview)

Menurut Umi Narimawati (2010:40) wawancara sebagai berikut:

"Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas". Adapun wawancara dilakukan terhadap Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mengenai sistem informasi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Kuesioner

Menurut Umi Narimawati (2010:40) sebagai berikut:

"Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya".

Uji Validitas

Menurut Cooper yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:42) validitas didefinisikan sebagai berikut:

"Validity is a characteristic of measurement concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".

Sedangkan menurut Sugiyono (2010:2) validitas didefinisikan sebagai berikut:

"Valid adalah menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

Berdasarkan pengertian di atas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Semua item pertanyaan dalam kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi pearson product moment.

Uji Realibilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji realibitas adalah sebagai berikut:

"Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument". Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan dan kepercayaan alat pengungkapan dari data. Metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah Split Half Method (Spearman-Brown Correlation) atau Teknik Belah Dua

Metode Pengujian Data

Metode Analisis

Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian.

Menurut Umi Narimawati (2010:245) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.

b. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.

c. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.

d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria sebagai berikut:

Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 2.0.

Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode Partial Least Square (PLS) dijelaskan sebagai berikut:

"Model persamaan strukturan berbasis variance (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (variable manifest)".

Penulis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (variable manifest), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (error). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan atas jawaban sementara mengenai sesuatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris, untuk mengetahui apakah pernyataan (dugaan/jawaban) itu dapat diterima atau tidak. Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah Sistem Pengendalian dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Analisis Deskriptif

1. Sistem Pengendalian Intern

Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem Pengendalian Intern

No	Pernyataan		Bobot Kategori					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
1	Lingkungan Pengendalin	F	6	11	5	9	1	32	108	160	67,5%	Cukup
		%	18,8	34,4	15,6	28,1	3,13	100				
2	Penilaian Resiko	F	6	15	5	6	0	32	117	160	73,1%	Baik
		%	18,8	46,9	15,6	18,8	0	100				
3	Kegiatan Pengendalian	F	1	14	10	7	0	32	105	160	65,6%	Cukup
		%	3,13	43,8	31,3	21,9	0	100				
4	Pemantauan	F	4	12	9	7	0	32	109	160	68,1%	Baik
		%	12,5	37,5	28,1	21,9	0	100				
5	Informasi dan Komunikasi	F	3	15	7	4	3	32	107	160	66,9%	Cukup
		%	9,38	46,9	21,9	12,5	9,38	100				
Total									**546**	**800**	**68,3%**	**Baik**

Dengan jumlah skor tanggapan responden dengan sebanyak 5 pernyataan yang diajukan mengenai variabel Sistem Pengendalian Intern (X1), maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Sistem Pengendalian Intern (X1) termasuk dalam kategori “Baik”.

2. *Good Governance*

Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Good Governance*

No	Pernyataan		Bobot Kategori					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
1	*Participation*	F	1	21	6	3	1	32	114	160	71,3%	Baik
		%	3,13	65,6	18,8	9,38	3,13	100				
2	*Rule of law*	F	1	24	2	3	2	32	115	160	71,9%	Baik
		%	3,13	75	6,25	9,38	6,25	100				
3	*Transparency*	F	10	16	0	4	2	32	124	160	77,5%	Baik
		%	31,3	50	0	12,5	6,25	100				
4	*Responsiveness*	F	3	12	10	6	1	32	106	160	66,3%	Cukup
		%	9,38	37,5	31,3	18,8	3,13	100				
5	*Strategic vision*	F	11	16	0	4	1	32	128	160	80,0%	Baik
		%	34,4	50	0	12,5	3,13	100				
6	*Equity*	F	7	16	2	6	1	32	118	160	73,8%	Baik
		%	21,9	50	6,25	18,8	3,13	100				
7	*Efficiency and effectiveness*	F	2	14	6	8	2	32	102	160	63,8%	Cukup
		%	6,25	43,8	18,8	25	6,25	100				
8	*.Accountability*	F	8	15	5	4	0	32	123	160	76,9%	Baik
		%	25	46,9	15,6	12,5	0	100				
9	*Concensus*	F	6	19	3	1	3	32	120	160	75,0%	Baik
		%	18,8	59,4	9,38	3,13	9,38	100				
Total									**1050**	**1440**	**72,9%**	**Baik**

Dengan jumlah skor tanggapan responden dengan sebanyak 9 pernyataan yang diajukan mengenai variabel *Good Governance* (X2) , maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai *Good Governance* (X2) termasuk dalam kategori “Baik”.

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

No	Pernyataan		Bobot Kategori					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
1	Efektifitas	F	5	21	3	3	0	32	124	160	77,5%	Baik
		%	15,6	65,6	9,38	9,38	0	100				
2	Pertumbuhan Pegawai	F	6	19	1	5	1	32	120	160	75,0%	Baik
		%	18,8	59,4	3,13	15,6	3,13	100				
3	Kepuasan Masyarakat	F	5	11	5	10	1	32	105	160	65,6%	Cukup
		%	15,6	34,4	15,6	31,3	3,13	100				
Total									**349**	**480**	**72,7%**	**Baik**

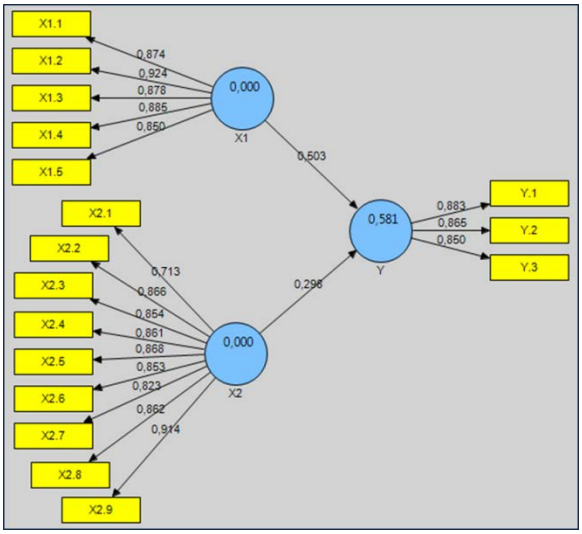
Dengan jumlah skor tanggapan responden dengan sebanyak 3 pernyataan yang diajukan mengenai variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) , maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Kinerja Pemerintah Daerah (Y) termasuk dalam kategori “Baik”.

Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode statistik Structural Equation Modelling (SEM) melalui pendekatan Partial Least Square (PLS).

Dalam structural equation modeling ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi varian masing-masing indikator (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (exogenous latent variable) terhadap variabel laten dependen (endogenous latent variable).

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dan 5 indikator yakni variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) terdiri dari 9 varibel indikator, variabel Good Governance (X2) terdiri dari 3 indikator, dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) terdiri dari 3 indikator. Berikut model yang akan diujikan dalam penelitian ini.



Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity

Convergent validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (indikator) dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. Uji convergent validity dengan program Partial Least Square (PLS) dapat dilihat dari loading factor untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai convergent validity nilai loading factor harus lebih dari 0,7 serta nilai average variance extracted (AVE) dan nilai communality harus lebih besar dari 0,5

Discriminant validity

Discriminant validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (indikator) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Uji discriminant validity dengan program Partial Least Square (PLS) dapat dilihat dari cross loading dengan cara membandingkan korelasi indikator dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan korelasi antara indikator dengan variabel laten yang lain. Atau dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk dalam model, discriminant validity yang baik ditunjukan dari akar kuadrat AVE untuk setiap kontstruk harus lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model.

Hasil Uji Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Latent

VARIABEL LATEN	AKAR AVE
X1	0,883
X2	0,847
Y	0,866

	KORELASI ANTAR VAR LATEN		
	X1	X2	Y
X1	1		
X2	0,799	1	
Y	0,741	0,700	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai akar AVE untuk setiap kontstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model sehingga variabel laten dinyatakan memiliki discriminant yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, ukuran cross loadings maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latentnya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat discriminant validity pada variabel reflektif telah terpenuhi.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis di atas, digunakan nilai tstatistik yang telah disajikan pada gambar 4., tstatistik untuk variabel X1 terhadap Y diperoleh sebesar 4,197. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima Ha, artinya bahwa Sistem Pengendalian Internal terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan kontribusi pengaruh sebesar 37,2%. an hubungan positif oleh Kepuasan Kerja.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis di atas, digunakan nilai tstatistik yang telah disajikan pada gambar 4., tstatistik untuk variabel X2 terhadap Y diperoleh sebesar 2,097. Nilai tersebut lebih besar dari 1,96 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan menerima Ha, artinya bahwa Good Governance terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan kontribusi pengaruh sebesar 20,8%.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern dan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung, artinya semakin baik sistem pengendalian intern, maka hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. Terkait masalah yang terjadi di fenomena yang ada yaitu banyak agenda reformasi dan Kegiatan pengendalian yang tidak tercapai, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan
3. Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah, artinya semakin diterapkannya Good Governance maka hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. Terkait masalah yang terjadi di fenomena yang ada yaitu pelayanan informasi masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurang efektifnya pelaksanaan program program juga. Mengingat hal tersebut bisa menjadi tolak ukur masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah daerah.

Saran

Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan sistem pengendalian intern yang masih belum optimal Pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, makan peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
2. Perwujudan pemisahan tugas dan wewenang yang lebih memadai lagi pada kemudian hari dan pemantuan harus dilaksankan lebih sering lagi untuk Dinas Perhubungan guna meningkatkan kepuasan masyarakat.
3. Untuk meningkatkan Good Governance yang masih belum optimal Pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka peneliti memberikan saran operasional sebagai berikut:
4. meningkatakan efektifitas dan effesiens dalam bekerja juga tanggapan atau respon kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi guna menaikan kepuasan masyarakat.

Saran Akademis

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk

melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengaruh sistem pengendalian intern dan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu SEM PLS, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah , Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat

Agus, Dwiyanto. 2009. Mewujudkandkan good governance melalui pelayananpublik. hal. 90 Yogyakarta: UGM Press.

Auditya, Lucy dan Husaini. 2013. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.

Bastian, Indra.2010.Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. PenerbitErlangga :Jakarta

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
2013. Internal Control – Integrated Framework. http://www.coso.org/.

Dadang Suwanda, 2013, Panduan Penerapan: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta :PPM

Dwiyanto, Agus, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press

Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Effendi Arief Muh. 2009. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi.Jakarta:Salemba Empat

Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu.(2010). AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Group.